

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 15 April 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 No.6 tanggal 16 April 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Instansi vertikal Perpustnas RI) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. SK Menteri PP dan K Nomor 29103/S Tahun 1959. Lintasan sejarah DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada Tahun 1959 dengan nama Perpustakaan Negara Banjarmasin berdasarkan SK Menteri PP dan K Nomor 29103/S tanggal 23 Mei 1959.

Pada tahun 1978 status Perpustakaan Negara ditingkatkan menjadi Perpustakaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0199/0/1978 tanggal 23 Juni 1978, menempati gedung eks Kanwil Depdikbud Provkalsel di Jalan Kapten Piere Tendean 106 Banjarmasin.

Seiring dengan lahirnya Keppres Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989 tentang Perpustakaan Nasional, maka ditetapkanlah Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 001/Org/9/90 tanggal 21 September 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, keadaan ini berlangsung sampai tahun 1997.

Pada Tahun 1997 terbit kembali Keppes Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI yang merupakan penyempurnaan Keppres Nomor 11 Tahun 1989, sejalan dengan Keppres tersebut keluar Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI yang mengukuhkan berdirinya Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Bapustarda Provinsi Kalimantan Selatan pertama kali dibentuk sebagai Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2001 tgl 8 November 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bapustarda Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil integrasi eksPerpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (*Instansi vertikal non departemen*) dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tahun 2004 adalah tahun dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di seluruh Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan sendirinya tatanan sistem pemerintahan daerah berubah dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Keadaan ini mengharuskan pembentukan Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di dalamnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan.¹

2. Profil Lemabaga Perpustakaan

Nama Perpustakaan : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Berdiri : 1959

Kelurahan : Pemurus Luar

Kecamatan : Banjarmasin Timur

Kota : Banjarmasin

Provinsi : Kalimantan Selatan

Status Perpustakaan : Dinas

Alamat : Jl. A. Yani Km. 6,400 No. 6

3. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, Pemberdayaan Perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus. Dari visi ini dirumuskan cita-cita dan keinginan DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberdayakan semua jenis perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan agar terciptanya masyarakat yang senang belajar dan gemar membaca serta masyarakat yang sadar akan arti pentingnya selemba

¹Wawancara Tata Usaha Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 14 Desember 2021

arsip untuk dilestarikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga akan terkumpul menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa.²

Kemudian misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan semua jenis perpustakaan dan arsip;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- c. Mengumpulkan dan melestarikan hasil budaya bangsa berupa karya cetak, rekam, dan arsip statis;
- d. Meningkatkan budaya baca dan budaya arsip dengan melibatkan semua unsur masyarakat;
- e. Pembentukan jaringan kerjasama perpustakaan, dokumentasi, informasi dan kearsipan;
- f. Mengelola arsip in aktif yang berasal dari dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi khazanah daerah;
- g. Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip statis/melalui kegiatan akuisisi dan alih media.

4. Sistem Layanan Perpustakaan

Sistem Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP) Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem layanan terbuka (*open access*) dalam

²Wawancara Tata Usaha Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 14 Desember 2021

memberikan layanan jasa kepada para penggunanya. Sistem layanan ini memberikan kebebasan kepada pamakai untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang diperlukan secara langsung.

Sistem layanan terbuka memberikan kesempatan kepada pemakai untuk mendapatkan koleksi seluas-luasnya. Tidak hanya sekedar membaca-baca, tetapi pengguna perpustakaan juga bisa mengetahui berbagai alternatif dari pilihan koleksi yang ada di rak untuk kemudian meminjam atau dibawa pulang.

5. Tujuan Perpustakaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 yang tercantum pasal 2, yaitu: Melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.

7. Fungsi Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berfungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, karya cetak dan karya rekam;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan kearsipan;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pelayanan perpustakaan kearsipan;
- f. Perumusan kebijakan operasional, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

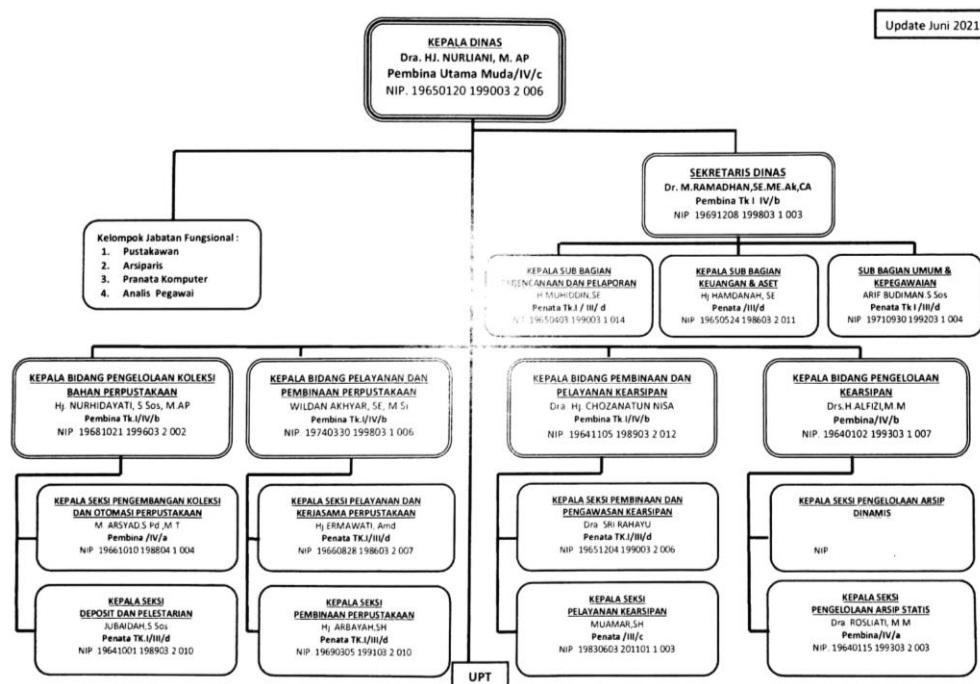
8. Alur Layanan Anggota Perpustakaan

Pertama-tama memulainya dengan mengisi formulir pendaftaran di link yang sudah di sediakan oleh perpustakaan dengan menggunakan komputer di ruang resepsionis, pastikan calon anggota membawa data diri berupa kartu tanda penduduk, setelah mengisi calon anggota perpustakaan akan di arahkan ke lantai dua ke tempat layanan anggota, kemudian calon anggota perpustakaan akan berfoto, setelah itu pendaftaran di proses oleh pustakawan

dan apabila data sudah lengkap maka selanjutnya akan di cetak kartu, kemudian calon anggota akan menunggu beberapa saat di ruang yang di sediakan dan nanti akan dipanggil oleh pustakawan dan setelah itu kartu anggota dapat digunakan untuk peminjaman buku dan daftar kunjungan anggota perpustakaan.

9. Struktur Organisasi

Tabel 4.1 Struktur Organisasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan³



10. Pustakawan

Tabel 4.2 Daftar Pustakawan

No	Nama	P/L	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Jenis	Pangkat
1	Drs. Muhammad, M. Si	L	Ilmu Admistrasi	Pustakawan Madya	JFT	IV/b

³Dokumentasi Tata Usaha Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 14 Desember 2021

			Negara			
2	Dra. Sukamawati Mahfuzah	P	S-1 Pendidikan Dasar	Pustakawan Madya	JFT	IV/a
3	Abdullah, S. Sos	L	Ilmu Administrasi Negara	Pustakawan Madya	JFT	IV/a
4	Hj. Royani Fithri, S. Sos	P	S-1 Administrasi Negara	Pustakawan Muda	JFT	III/d
5	Basniah, A. Ma	P	Perpustakaan	Pustakawan Penyelia	JFT	III/d
6	Mariani, A. Ma	P	D-II SOSPOL Perpustakaan	Pustakawan Penyelia	JFT	III/c
7	Rahmawati	P	SMA A.2 / Biologi	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	JFT	III/b
8	Khairani	L	-	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	JFT	III/b
9	Suhaimi	L	SMA A.3 / IPS	Pustakawan Mahir	JFT	III/b
10	Humaini, S. I Pust	L	Ilmu Perpustakaan	Pustakawan	JFT	III/a
11	Masliyanti, A, Md	P	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	JFT	III/a
12	Rasyidi, A. Ma	L	D-II Perpustakaan	Pustakawan Pelaksana	JFT	II/d
13	Isnaniah	P	-	Pustakawan Pelaksana	JFT	II/d
14	Rahadian Ridhani	L	Ilmu Pengetahuan Sosial	Pustakawan Pelaksana	JFT	II/c

Berikut tabel hasil observasi yang akan menentukan kesesuaian penelitian berdasarkan teori.

Tabel 4.3 Hasil Observasi

No	Fokus Penelitian	Hasil Observasi	Teori
1	a. Kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan	1) Kompetensi Umum Hasil observasi yang penulis lakukan	Berdasarkan hasil observasi di lapangan memiliki kesesuaian dengan yang di

	<p>Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu mengoperasikan komputer tingkat dasar, kemudian setiap awal tahun akan menyusun rencana kerja dan di akhir tahun membuat laporan kerja.</p>	<p>kemukakan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang perpustakaan menyebutkan tiga unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan, salah satunya yaitu kompetensi umum yakni, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, dan diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoperasikan komputer tingkat dasar, 2) Menyusun rencana kerja perpustakaan, 3) Membuat laporan kerja perpustakaan.
		<p>2) Kompetensi Personal</p> <p>Hasil observasi yang penulis amati, bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki jiwa kemandirian hal ini terlihat saat peneliti berada di perpustakaan di</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi teori ini memiliki kesesuaian dengan yang dikemukakan oleh Blasius Sudarsono dalam Antologi Kepustakawan Indonesia yang menyatakan bahwa,</p> <p>Kompetensi personal adalah keterampilan atau keahlian. Sikap dan nilai yang memungkinkan</p>

		<p>ruang koleksi, terlihat pustakawan yang secara mandiri dapat menemukan buku yang sedang dicari oleh pemustaka tanpa menggunakan alat bantu atau opac, kemudian pustakawan juga memiliki kejujuran dan keberanian hal ini penulis amati saat melihat bagaimana pustakawan berani tuk memulai komunikasi saat melihat ada pemustaka yang kebingungan mencari buku, dan mengatakan kejujuran saat bahwa tidak ada koleksi yang dicari oleh pemustaka tersebut, kemandirian dan keunggulan pustakawan di perpustakaan daerah provinsi terlihat ketika mereka dapat mengarahkan kemana dan dimana koleksi yang dicari pemustaka yang tidak tersedia di perpustakaan provinsi tetapi ada di perpustakaan setempat di wilayah provinsi kalimantan selatan.</p>	<p>pustakawan bekerja secara efisien, menjadi komunikator yang baik, memusatkan perhatian pada semangat belajar sepanjang karirnya. Kemudian keselasan juga terdapat pada teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni, mengatakan bahwa kompetensi personal antara lain berupa kemandirian, keindependenan, kejujuran-keberanian, keadilan, keterbukaan, mengelola diri sendiri dan menempatkan diri sendiri secara bermakna serta orientasi pada keunggulan yang sesuai dengan kehidupan global.</p>
--	--	--	--

		<p>3) Kompetensi Fungsional</p> <p>Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu melakukan seleksi bahan pustaka, melakukan pengadaan bahan perpustakaan, melakukan pengkatalogan, perawatan bahan pustaka, kemudian mampu melakukan layanan sirkulasi, referensi, penulisan, promosi perpustakaan, literasi, dan memanfaatkan jaringan internet yang disediakan perpustakaan.</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi di lapangan memiliki kesesuaian dengan yang di kemukakan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang perpustakaan menyebutkan tiga unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan, salah satunya yakni kompetensi fungsional, mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pustakawan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan seleksi bahan perpustakaan, 2) Melakukan pengadaan bahan perpustakaan, 3) Melakukan pengkatalogan deskriptif, 4) Melakukan pengkatalogan subjek, 5) Melakukan perawatan bahan perpustakaan, 6) Melakukan layanan sirkulasi, 7) Melakukan layanan referensi,
--	--	--	---

			<p>8) Melakukan penelusuran informasi sederhana</p> <p>9) Melakukan promosi perpustakaan,</p> <p>10) Melakukan kegiatan literasi,</p> <p>11) Memanfaatkan jejaring internet untuk melayani pemustaka.</p>
		<p>4) Kompetensi Profesional</p> <p>Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kemampuan sumber daya informasi, akses informasi, dan teknologi informasi.</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan Dewan Direktur Special Libraries Association (SLA), yakni Kompetensi profesional menyangkut pengetahuan yang dimiliki pustakawan khusus dalam bidang sumberdaya informasi, akses informasi, teknologi informasi, manajemen riset, serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai basis dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi.</p>
		<p>5) Kompetensi Khusus</p> <p>Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

		Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu merancang tata ruang, melakukan perbaikan bahan pustaka.	Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang perpustakaan yakni mampu melakukan dan merancang tata ruang perpustakaan dan melakukan perbaikan bahan pustaka.
		6) Kompetensi Intelektual Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kemampuan berfikir dan bernalar, kreatif, dan mampu memecahkan masalah di dalam perpustakaan.	Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni Kompetensi intelektual antara lain berupa kemampuan berfikir dan bernalar, kemampuan kreatif (meneliti dan menemukan), kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan yang mendukung kehidupan global.
		7) Kompetensi Komunikatif Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu menguasai sarana komunikasi,	Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni kompetensi komunikatif antara lain berupa kemahir kewacanaan, kemampuan menguasai sarana komunikasi mutakhir, kemampuan bekerja

		<p>memiliki jiwa kerjasama yang baik, dan mampu membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain hal ini terlihat banyak nya perpustakaan sekolah dan lainnya yang berkunjung atau studi banding untuk dapat mengambil apa yang di perlukan perpustakaan mereka agar dapat memberikan layanan yang terbaik untuk pemustakanya.</p>	<p>sama, dan kemampuan membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain yang mendukung kehidupan global dalam sistem dunia.</p>
		<p>8) Kompetensi Sosial Budaya Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu memahami keberadaan dan menghormati kebiasaan dan berinteraksi dengan masyarakat.</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni, Kompetensi sosial-budaya antara lain berupa kemampuan hidup bersama orang lain, kemampuan memahami dan menyelami/memahami keberadaan orang/pihak lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, kemampuan berhubungan atau berinteraksi dengan pihak lain, dan kemampuan berkerja sama secara</p>

			multikultural.
	b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pustakawan.	1) Hasil observasi yang penulis dapatkan bahwa perpustakaan selalu mengadakan lomba pustakawan, yang mana tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pustakawan, kemudian perpustakaan juga mengadakan pelatihan kompetensi pustakawan serta tergabung dalam organisasi pustakawan yaitu IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia).	Berdasarkan hasil observasi memiliki kesesuaian dengan UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 ayat 8, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Menurut Sulistyio Basuki, pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.
		2) Dana/anggaran Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perencanaan Ibu Hj. Royani mengatakan bahwa untuk anggaran dalam	Dari uraian tersebut hasil observasi ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan Kepala Perpusna RI yaitu Muhammad Syarif Bando dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional

		<p>pelaksanaan kegiatan perpustakaan seperti kompetensi pustakawan sudah ada dimasukkan dalam perencanaan program kerja yang dana atau anggarannya berasal dari Perpusna RI yang bersumber dari dana alokasi khusus dalam APBN kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang perpustakaan.</p>	<p>Republik Indonesia di bagian pengelolaan perpustakaan yaitu perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat. Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.</p>
		<p>3) Waktu</p> <p>Hasil observasi yang penulis dapatkan mengenai waktu dalam pelaksanaan program kerja perpustakaan ada beberapa kegiatan yang tertunda dikarenakan pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari daerah. Meskipun pandemi tidak memudahkan semangat pustakawan dan staf</p>	<p>Dari uraian tersebut hasil observasi ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan Kepala Perpusna RI yaitu Muhammad Syarif Bando dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian pengelolaan perpustakaan yaitu, pengelolaan perpustakaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan. Rencana strategis dan</p>

		<p>perpustakaan dalam memberikan layanan sehingga rencana kerja tahunan yang disusun dapat direalisasikan hal ini dapat dilihat dalam akun media sosial <i>instagram</i> perpustakaan yang selalu memberikan berita update mengenai kegiatan perpustakaan.</p>	<p>rencana kerja disusun oleh perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis dan program kerja tahunan disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.</p>
		<p>4) Sumber Daya Manusia (Pustakawan) Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk pustakawan murni yang ada di perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan hanya ada 13 orang, yang dilain bisa dikatakan sebagai pegawai atau staff perpustakaan dan lainnya. Dengan jumlah 13 orang yang notabeneh tidak semua murni berasal dari pendidikan perpustakaan mengakibatkan distorsi sehingga hal ini berdampak pada pelayanan dan pengorganisasian perpustakaan</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Wahid Nashihuddin yakni, kurangnya pegawai atau SDM Pustakawan yang kompeten di bidang Perpustakaan juga melatarbelakangi kompetensi profesional dimata pemustaka, hal ini dikarenakan jika Petugas/Pustakawan kurang memahami prosedur pelayanan dan pengorganisasian di dalam perpustakaan akan memberikan dampak yang kurang baik di kalangan pemustaka. Di lapangan menunjukan adanya distorsi diantaranya sebagai berikut:</p>

			<p>1) Kinerja pustakawan terkesan tidak profesional dalam memberikan layanan cepat kepada pemustaka,</p> <p>2) Kurangnya tenaga kerja ahli dalam bidang perpustakaan hal ini berpengaruh terhadap kompetensi profesional pustakawan.</p>
--	--	--	--

B. Sajian Data

Pada bagian ini disajikan penyajian data berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh dari pustakawan tentang kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Bagaimana kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam judul kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adapun hasil wawancara peneliti dengan Pa Humaini selaku ahli pertama pustakawan, beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah pustakawan disini ada 14 kegiatan kami biasanya di awal tahun adalah menyusun rencana kerja dan pada akhir tahun kami menyusun laporan kerja yang terlaksana, diantara kegiatan saya sendiri selaku pustakawan di perpustakaan ini ditempatkan di bidang layanan seperti selfing dan sirkulasi, kemudian ada ibu Mariani yang ditempatkan di bidang referensi, lalu pa Rahadian dengan ibu Hj. Royani yang ditempatkan di bidang pengolahan, kemudian pa Muhammad bersama ibu Bayah yang berada di bidang pembinaan perpustakaan,

tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu kami dipindahkan ke bidang lainnya, sehingga kami harus mampu menguasai selain bidang yang saat ini kami jalani, karena tidak semua pustakawan yang ada disini berpendidikan ilmu perpustakaan maka biasanya sebelum ditempatkan ke bidang yang lainnya, kepala bidang memberikan pelatihan kemudian mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan sesuai bidang yang dikuasai”.⁴

Berdasarkan pemaparan Pa Humaini dapat diketahui bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditempatkan di berbagai bidang, sehingga pustakawan harus mampu mengelola perpustakaan dengan bidangnya masing-masing serta diharuskan untuk dapat memiliki kemampuan di bidang selain bidang yang ditempatkan, dengan adanya pelatihan, serta sertifikasi kompetensi pustakawan yang selaras dengan bidang yang dikuasai. Dalam hal ini Pa Humaini memiliki kompetensi umum, karena beliau memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, kemudian menyusun rencana kerja dan membuat laporan kerja perpustakaan, selanjutnya beliau mengatakan:

“Sebagai seorang pustakawan kita harus memiliki sikap mandiri, jujur, keberanian dan keterbukaan terhadap apa yang diperlukan perpustakaan, sehingga dengan ini kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka perpustakaan serta hal ini dapat meningkatkan kemampuan diri kita sebagai seorang pustakawan”.⁵

Berdasarkan pemaparan yang beliau sampaikan, peneliti melihat dan mengambil kesimpulan bahwa Pa Humaini memiliki kompetensi personal yaitu kemandirian, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kemampuannya sebagai pustakawan yang berkompetensi. Dalam

⁴Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama Bapak Humaini selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

⁵Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama Bapak Humaini selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

wawancara selanjutnya peneliti bertanya kepada Pa Humaini apa saja kompetensi yang dia miliki, kemudian bagaimana mendapatkan kompetensi tersebut?

“Saya mampu melakukan pengkatalogan, seleksi bahan pustaka, pengadaan bahan pustaka, layanan sirkulasi, layanan referensi, merancang tata ruang kemudian melakukan kegiatan literasi serta mampu memanfaatkan jejaring internet untuk melayani pemustaka. Dalam hal ini semua dicapai melalui pendidikan, saya berpendidikan S 1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka, bagi saya dimanapun saya ditempatkan baik itu bidang layanan sirkulasi dan lainnya, hal yang paling utama bagi saya adalah meningkatkan kualitas dan tak pernah berhenti untuk belajar, sehingga saya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka. Dan alhamdulillah selama saya bekerja disini perpustakaan ada memberikan pelatihan dan sebagainya sehingga hal ini berdampak pada kompetensi yang saat ini saya miliki”.⁶

Berdasarkan pemaparan Pa Humaini, maka peneliti berkesimpulan bahwa beliau memiliki kesesuaian dengan teori yang menunjukkan syarat kompetensi yang dimiliki, seperti kompetensi personal, umum, fungsional, profesional, khusus, komunikatif, dan kompetensi intelektual yang sesuai dengan indikator pertanyaan peneliti.

Dengan demikian peran perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi pustakawan terlihat dengan diadakannya pelatihan-pelatihan kepustakawanan. Selanjutnya peneliti mewawancarai pustakawan yang ditempatkan di bidang layanan referensi yaitu Bu Masliyanti, dalam hal ini beliau mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya aku ini lebih menguasai bidang layanan umum di koleksi, cuman kan disini banyak unit yang ada di perpustakaan, dan pimpinan menempatkan aku di layanan referensi, tapi kurang lebih sama semua yang ada pada layanan perpustakaan ini, cuman kendalanya saja yang berbeda, seperti di layanan temu balik informasi banyak menemui berbagai karakter pemustaka, selain itu banyak juga terdapat buku nyasar yang tak sesuai pada tempatnya, sehingga ketika mencari koleksi tersebut memerlukan waktu yang lama, akibatnya pelayanan kepada pemustaka menjadi kurang baik, ya hal ini aku maklumi kan kada semua orang sini memiliki pendidikan perpustakaan, kemudian ketika

⁶Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama Bapak Humaini selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

koleksi yang dicari pemustaka tidak tersedia disini, nah biasanya aku akan mencarikan referensi yang berkaitan dengan subjek yang dicari namun kadang dengan buku yang sama, nah mun kadada jua, aku mencari di perpustakaan lain dengan menggunakan jaringan kerja sama, sehingga pemustaka aku arahkan tuk mencari di perpustakaan yang memiliki koleksi itu”.⁷

Berdasarkan pemaparan Bu Masliyanti, peneliti menyimpulkan bahwa beliau memiliki kompetensi intelektual yang mana beliau memiliki kemampuan berfikir dan bernalar, kreatif, dan mampu memecahkan masalah seperti ketika buku yang dicari pemustaka tidak ada di perpustakaan, beliau memberikan referensi yang berkaitan sampai mengarahkan pemustaka dalam menemukan buku yang dicari di perpustakaan lainnya. Selanjutnya Bu Masliyanti mengatakan sebagai berikut:

“Sebelumnya aku mengikuti lomba pustakawan berprestasi tingkat provinsi tahun 2021, dan kemarin ikut uji kompetensi bidang referensi, dan tidak hanya mesti layanan referensi saja yang dikuasai, sebelum disini aku sudah pernah ditempatkan di bidang layanan anak, layanan umum, layanan keliling, dan setelah mengikuti uji kompetensi bidang referensi aku hanyar ja di pindah, kurang lebih sudah 11 tahun bekerja disini cuma bidang pengolahan wan pembinaan belum selebihnya sudah pernah semua”.⁸

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi Bu Masliyanti selaku pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kesesuaian dengan indikator kompetensi profesional, fungsional, personal, komunikatif, dan kompetensi umum. Hal ini dibuktikan dengan perjalanan kerja yang sudah beliau hadapi yang berawal dari layanan anak, kemudian di pindah ke layanan keliling, lalu ke layanan sirkulasi penelusuran

⁷Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama ibu Masliyantu selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

⁸Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama ibu Masliyanti selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

temu balik bahan pustaka , hingga sampai berada di layanan referensi yang ditempatkan setelah mengikuti uji kompetensi di bidang referensi hanya bidang pengolahan dan pembinaan yang belum.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Pa Rahadian Ridhani selaku pustakawan yang berada di bidang pengolahan di perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

“Dalam kegiatan di bidang pengolahan bisanya aku melakukan seleksi bahan pustaka, kemudian melakukan pengadaan bahan pustaka, sebelumnya melakukan analisis kebutuhan bahan pustaka, lalu mengelola data dan informasi perpustakaan”⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dengan bidang yang ditempati serta kegiatan yang dilakukan memiliki kesesuaian dengan sub indikator kompetensi fungsional, umum, dan intelektual, sebagaimana dalam hal analisis bahan pustaka adalah kegiatan yang memerlukan kemampuan berfikir dan bernalar, lalu mengoperasikan komputer untuk mengelola data dan informasi perpustakaan.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pustakawan?

Kemudian Bu Masliyanti mengatakan faktor-faktor dalam pembentukan kompetensi pustakawan, sebagai berikut:

“kada semua yang bekerja disini berlatar pendidikan pustakawan, ya orang-orang banyak mikirnya kalau sudah kerja disini pustakawan, nah kami pun yang lulusan berlatar pendidikan pustakawan pun memiliki kesusahan setelah lulus kemudian menerapkan teori dengan dilapangan tidak sama, jadi ketika ada pelatihan kami pun ikut, selain menambah ilmu pelatihan ini pun memberikan dampak yang positif, kaya SOP (standar operasional prosodure) ini nah kan

⁹Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama bapak Rahadian Ridhani selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

banyak karakter pemustaka nah kalau kadada pelatihan ini biar tinggi ilmu kalau adab kadada kan kada baik dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka, contohnya ketika ada pemustaka betakun mencari ini lalu kita mencari pas kadada di rak nya, inya kada mau repot lalu ae menyambat kadada, padahal seorang pustakawan nah kada boleh menyambat kadada dalam memberikan pelayanan, ya paling kada mencarikan di rak lain, ya karna kada semua disini pustakawan pang jadi pas selfing bukunya bebarang haja meandak, lalu setidaknya mencarikan referensi yang berkaitan, dan habisnya tuh batas paling maksimal yaitu menelpon di perpustakaan lain lalu kalau ada mengarahkan pemustaka agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi”.¹⁰

Berdasarkan penyampaian Bu Masliyanti dalam wawancara di atas, peneliti memahami bahwa dengan adanya pelatihan kepastakawanan ini dapat membantu pustakawan maupun yang non pustakawan dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai dengan baik, kemudian kendala yang terjadi menurut peneliti berdasarkan wawancara tersebut adalah tidak semua orang yang bekerja di perpustakaan memiliki pendidikan perpustakaan sehingga dalam pelayanan perpustakaan menjadi tidak efektif, hal ini sesuai dengan indikator mengenai kendala kompetensi pustakawan yaitu sumber daya manusianya yang lata belakang pendidikannya bukan pustakawan.

Wawancara selanjutnya yaitu besama Pa Rahadian Ridhani, beliau mengatakan:

“Biasanya sering mengikuti pelatihan, seminar, dan organisasi IPI dalam meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka, kemudiam ada sertifikasi yang diadakan perpustakaan dan tim pengujinya langsung dari perpusnas, namun karena pandemi ada beberapa kegiatan yang ditunda.”¹¹

¹⁰Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama ibu Masliyanti selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

¹¹Wawancara tanggal 13 Desember 2021 bersama bapak Rahadian Ridhani selaku pustakawan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kompetensi pustakawan yang paling efektif dilakukan perpustakaan adalah memberikan pelatihan kepada pustakawan dan non pustakawan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemustaka.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bu Hj, Arbayah dengan Pa Muhammad selaku orang yang berada di bidang perencanaan dan pembinaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Biasanya kami memeberikan pelatihan, seminar , dan lomba pustakawan yang mana memang sudah menajdi perogram tahunan, dan dana nya berasal dari APBD yang disesuaikan dengan kegiatan perpustakaan, jika seorang pustakawan tidak memiliki kompetensi maka pelayanan akan menjadi kurang baik, sehingga diadakanlah pelatihan, seminar,dan lomba pustakawan kemudian ada juga diadakan sertifikasi kompetensi sesuai bidang yang diikuti, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi pustakawan dan staf lainnya”.¹²

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkawan bahwa pelatihan dan seminar memang sudah menjadi kegiatan tahunan artinya perpustakaan memberikan fasilitas dalam meningkatkan kompetensi pustakawan dan stafnya, hal ini sesuai dengan wawancara sebelumnya yang mana tidak semua orang di perpustakaan memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, sehingga dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka.

¹²Wawancara tanggal 14 Desember 2021 bersama bapak Muhammad dan ibu Hj Arbayah selaku pustakawan dan kepala bidang pembinaan dan perencanaan perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan.

C. Analisis Data

1. Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kompetensi yang sebagian besar diperoleh melalui pelatihan, karena tidak semua pustakawan berlatar pendidikan perpustakaan, hal ini mempengaruhi kompetensi para pustakawan sehingga perpustakaan mengadakan upaya memaksimalkan pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi pustakawan melalui pelatihan, selain itu juga dengan mengikuti organisasi IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia).

Undang-undang no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan ialah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh beban induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperolehnya dari pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan pustakawan memiliki kesesuaian dengan karakteristik kompetensi pustakawan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Umum

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu mengoperasikan komputer tingkat dasar, kemudian setiap awal tahun pustakawan akan menyusun rencana kerja dan di akhir tahun membuat laporan kerja. Dalam wawancara peneliti dengan bapak humaini selaku ahli pertama pustakawan, beliau mengatakan bahwa:

“jumlah pustakawan disini ada 14 kegiatan kami biasanya di awal tahun adalah menyusun rencana kerja dan pada akhir tahun kami menyusun laporan kerja yang terlaksana ...”

Berdasarkan pemaparan di atas memiliki kesesuaian dengan yang di kemukakan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang perpustakaan menyebutkan tiga unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan, salah satunya yaitu kompetensi umum yakni, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, dan diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi:

- a. Mengoperasikan komputer tingkat dasar,
- b. Menyusun rencana kerja perpustakaan,

c. Membuat laporan kerja perpustakaan.

b. Kompetensi Personal

Berdasarkan Hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki jiwa kemandirian hal ini terlihat saat peneliti berada di perpustakaan di ruang koleksi, terlihat pustakawan yang secara mandiri dapat menemukan buku yang sedang dicari oleh pemustaka tanpa menggunakan alat bantu atau opac, kemudian pustakawan juga memiliki kejujuran dan keberanian hal ini penulis amati saat melihat bagaimana pustakawan berani tuk memulai komunikasi saat melihat ada pemustaka yang kebingungan mencari buku, dan mengatakan kejujuran saat bahwa tidak ada koleksi yang dicari oleh pemustaka tersebut, kemandirian dan keunggulan pustakawan di perpustakaan daerah provinsi terlihat ketika mereka dapat mengarahkan kemana dan dimana koleksi yang dicari pemustaka yang tidak tersedia di perpustakaan provinsi tetapi ada di perpustakaan setempat di wilayah provinsi kalimantan selatan.

Hasil observasi diatas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Blasius Sudarsono dalam Antologi Kepustakawan Indonesia yang menyatakan bahwa, kompetensi personal adalah keterampilan atau keahlian. Sikap dan nilai yang memungkinkan pustakawan bekerja secara efisien, menjadi komunikator yang baik, memusatkan perhatian pada semangat belajar sepanjang karirnya.

Kemudian keselasan juga terdapat pada teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni, mengatakan bahwa kompetensi personal antara lain berupa kemandirian, keindependenan, kejujuran-keberanian, keadilan, keterbukaan, mengelola diri sendiri dan menempatkan diri sendiri secara bermakna serta orientasi pada keunggulan yang sesuai dengan kehidupan global.

c. Kompetensi Fungsional

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu melakukan seleksi bahan pustaka, melakukan pengadaan bahan perpustakaan, melakukan pengkatalogan, perawatan bahan pustaka, kemudian mampu melakukan layanan sirkulasi, referensi, penelusuran, promosi perpustakaan, literasi, dan memanfaatkan jaringan internet yang disediakan perpustakaan. sebagaimana yang dikatakan Ibu Masliyanti, sebagai berikut:

“Saya mampu melakukan pengkatalogan, seleksi bahan pustaka, pengadaan bahan pustaka, layanan sirkulasi, layanan referensi, merancang tata ruang kemudian melakukan kegiatan literasi serta mampu memanfaatkan jejaring internet untuk melayani pemustaka. Dalam hal ini semua dicapai melalui pendidikan, saya berpendidikan S 1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Terbuka, bagi saya dimanapun saya ditempatkan baik itu bidang layanan sirkulasi dan lainnya, hal yang paling utama bagi saya adalah meningkatkan kualitas dan tak pernah berhenti untuk belajar, sehingga saya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka. Dan alhamdulillah selama saya bekerja disini perpustakaan ada memberikan pelatihan dan sebagainya sehingga hal ini berdampak pada kompetensi yang saat ini saya miliki”.

Berdasarkan pemaparan di atas memiliki kesesuaian dengan yang dikemukakan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang perpustakaan menyebutkan tiga unit kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan, salah satunya yakni kompetensi fungsional, mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pustakawan meliputi:

- 1) Melakukan seleksi bahan perpustakaan,
- 2) Melakukan pengadaan bahan perpustakaan,
- 3) Melakukan pengkatalogan deskriptif,
- 4) Melakukan pengkatalogan subjek,
- 5) Melakukan perawatan bahan perpustakaan,
- 6) Melakukan layanan sirkulasi,
- 7) Melakukan layanan referensi,
- 8) Melakukan penelusuran informasi sederhana
- 9) Melakukan promosi perpustakaan,
- 10) Melakukan kegiatan literasi,
- 11) Memanfaatkan jejaring internet untuk melayani pemustaka.

d. Kompetensi Intelektual

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kemampuan berfikir dan bernalar, kreatif, dan mampu memecahkan masalah di dalam perpustakaan.

seperti yang pernah dialami Ibu Masliyanti dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan:

“Ketika koleksi yang dicari pemustaka tidak tersedia disini, nah biasanya aku akan mencarikan referensi yang berkaitan dengan subjek yang dicari namun kadang dengan buku yang sama, nah mun kadada jua, aku mencari di perpustakaan lain dengan menggunakan jaringan kerja sama, sehingga pemustaka aku arahkan tuk mencari di perpustakaan yang memiliki koleksi itu”

Berdasarkan pemaparan diatas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni Kompetensi intelektual antara lain berupa kemampuan berfikir dan bernalar, kemampuan kreatif (meneliti dan menemukan), kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan yang mendukung kehidupan global.

e. Kompetensi Komunikatif

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu menguasai sarana komunikasi, memiliki jiwa kerjasama yang baik, dan mampu membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain hal ini terlihat banyaknya perpustakaan sekolah dan lainnya yang berkunjung atau studi banding untuk dapat mengambil apa yang di perlukan perpustakaan mereka agar dapat memberikan layanan yang terbaik untuk pemustakanya.

Dengan demikian hasil wawancara dan observasi memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni kompetensi komunikatif antara lain berupa kemahir kewacanaan, kemampuan menguasai sarana komunikasi mutakhir, kemampuan

bekerja sama, dan kemampuan membangun hubungan-hubungan dengan pihak lain yang mendukung kehidupan global dalam sistem dunia.

f. Kompetensi Sosial Budaya

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mampu memahami keberadaan dan menghormati kebiasaan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Widjanto yakni, kompetensi sosial-budaya antara lain berupa kemampuan hidup bersama orang lain, kemampuan memahami dan menyelami/memahami keberadaan orang/pihak lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, kemampuan berhubungan atau berinteraksi dengan pihak lain, dan kemampuan bekerja sama secara multikultural.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 14 orang pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, untuk memaksimalkan pelayanan kepada pemustaka perpustakaan melakukan berbagai upaya dan cara agar kompetensi pustakawan khususnya

yang bukan berlatar pendidikan perpustakaan dapat dimaksimalkan yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi pustakawan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan pustakawan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pustakawan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Lomba Pustakawan, Pendidikan, Seminar dan Pelatihan

Hasil observasi yang penulis dapatkan bahwa perpustakaan selalu mengadakan lomba pustakawan, yang mana tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pustakawan, kemudian perpustakaan juga mengadakan pelatihan kompetensi pustakawan serta tergabung dalam organisasi pustakawan yaitu IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). Seperti yang dikatakan Ibu Hj, Arbayah dengan Bapak Muhammad selaku orang yang berada di bidang perencanaan dan pembinaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Biasanya kami memeberikan pelatihan, seminar , dan lomba pustakawan yang mana memang sudah menajdi perogram tahunan, dan dananya berasal dari APBD yang disesuaikan dengan kegiatan perpustakaan, jika seorang pustakawan tidak memiliki kompetensi maka pelayanan akan menjadi kurang baik, sehingga di adakanlah pelatihan, seminar,dan lomba pustakawan kemudian ada juga diadakan sertifikasi kompetensi sesuai bidang yang di ikuti, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi pustakawan dan staf lainnya”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara memiliki kesesuaian dengan UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 ayat 8, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan/ pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Menurut Sulisty Basuki, pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

b. Dana/anggaran

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perencanaan Ibu Hj. Royani mengatakan bahwa untuk anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan seperti kompetensi pustakawan sudah ada dimasukkan dalam perencanaan program kerja yang dana atau anggarannya berasal dari Perpusna RI yang bersumber dari dana alokasi khusus dalam APBN kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang perpustakaan.

Dari uraian tersebut hasil observasi ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan Kepala Perpusna RI yaitu Muhammad Syarif Bando dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian pengelolaan perpustakaan yaitu perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat. Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

c. Waktu

Hasil observasi yang penulis dapatkan mengenai waktu dalam pelaksanaan program kerja perpustakaan ada beberapa kegiatan yang tertunda dikarenakan pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari daerah. Meskipun pandemi tidak memudarkan semangat pustakawan dan staf perpustakaan dalam memberikan layanan sehingga rencana kerja tahunan yang disusun dapat direalisasikan hal ini dapat dilihat dalam akun media sosial *instagram* perpustpalnam yang selalu memberikan berita update mengenai kegiatan perpustakaan.

Dari uraian tersebut hasil observasi ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan Kepala Perpusna RI yaitu Muhammad Syarif Bando dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian pengelolaan perpustakaan yaitu, pengelolaan perpustakaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan. Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis dan program kerja tahunan disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.

d. Sumber Daya Manusia (Pustakawan)

Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk pustakawan murni yang ada di perpustakaan daerah provinsi Kalimantan Selatan hanya ada 14

orang, yang dilain bisa dikatakan sebagai pegawai atau staf perpustakaan dan lainnya. Dengan jumlah 14 orang yang notabeneh tidak semua murni berasal dari pendidikan perpustakaan mengakibatkan kurangnya pengetahuan perpustakaan sehingga hal ini berdampak pada pelayanan dan pengorganisasian perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Wahid Nashihuddin yakni, kurangnya pegawai atau SDM Pustakawan yang kompeten di bidang Perpustakaan juga melatarbelakangi kompetensi profesional dimata pemustaka, hal ini dikarenakan jika Petugas/Pustakawan kurang memahami prosedur pelayanan dan pengorganisasian di dalam perpustakaan akan memberikan dampak yang kurang baik di kalangan pemustaka. Di lapangan menunjukan adanya distorsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kinerja pustakawan terkesan tidak profesional dalam memberikan layanan cepat kepada pemustaka,
- 2) Kurangnya tenaga kerja ahli dalam bidang perpustakaan hal ini berpengaruh terhadap kompetensi profesional pustakawan.